



PEMKOT DIMINTA ANTISIPASI HOAKS TERKAIT KORONA

Prosedur Ditetapkan, Belum Perlu Anggaran Khusus

YOGYA (KR) - RS Jogja ditunjuk sebagai salah satu dari empat rumah sakit di DIY yang menjadi rujukan kewaspadaan kasus Korona. Secara umum, alur penanganan atau prosedur pun sudah ditetapkan serta belum perlu anggaran khusus.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya Tri Mardaya, menjelaskan dari segi kebutuhan anggaran Pemkot sebenarnya cukup memadai. Hanya, ada beberapa alat pelindung diri yang mulai langka seperti kebutuhan masker. "Mekanisme pembiayaan juga sudah jelas. Misalnya kalau terkait penanganan di rumah sakit tipe D dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Jika ada kasus positif Korona, maka Kementerian Kesehatan akan membiayai," urainya usai rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Yogya, Senin (9/3).

Terkait prosedur penanganan juga sudah ditetapkan. Pasien yang meng-

alami gejala seperti batuk, pilek atau demam tidak langsung dirujuk ke RS Jogja melainkan dari bawah atau puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun begitu mengarah terindikasi COVID-19, akan ditangani di RS Jogja. Begitu pula kesiapan RS Jogja, menurut Tri Mardaya tidak perlu diragukan lagi.

Senada disampaikan Direktur Utama RS Jogja dr Ariyudi Yunita yang mengaku sudah ada persiapan khusus. Bahkan sejak Januari 2020 pihaknya telah membentuk tim mulai dokter spesialis dalam, anak, mikrobiologi hingga anastesi. "Karena kami sudah ditunjuk sebagai salah

satu rumah sakit rujukan, maka harus siap," tandasnya.

Saat ini RS Jogja memiliki 10 ruang isolasi. Akan tetapi yang khusus disiapkan untuk kasus Korona ialah dua ruang. Alat pelindung diri sebagian juga dipasok dari BPBD Kota Yogya. Hanya, untuk baju pelindung helmet baru tersedia 10 unit, namun akan segera dicukupi oleh Kementerian Kesehatan agar jumlahnya sesuai standar pelayanan Korona. "Setiap pasien yang datang kami tangani sesuai standar. Kami juga awasi kalau ada pasien yang pernah mengunjungi wilayah yang terkena infeksi atau pernah berhubungan dengan orang yang terkena infeksi," jelasnya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Suryani, berharap agar Pemkot bisa mengantisipasi berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat. Hoaks tersebut kerap menyebar melalui berbagai

platform media sosial. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* kewaspadaan kasus Korona pun perlu mengaktifkan media sosial yang dimiliki. Setiap ada berita bohong, bisa langsung diluruskan agar tidak meresahkan masyarakat.

Selain itu, imbuhan Suryani, dari sisi internal di lingkungan Dinas Kesehatan diakuinya sudah memiliki standar yang bagus. Hanya, hal itu perlu juga diikuti oleh perangkat daerah yang lain. Sehingga perlu ada kebijakan agar setiap perkantoran memiliki standar kesehatan yang baik. "Yogya ini kan banyak dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Setiap ruang publik alangkah lebih bagus jika dilengkapi standar kesehatan seperti cairan pencuci tangan dan lainnya. Jadi siapapun yang datang ke kota ini turut diajak menerapkan pola hidup bersih dan sehat," imbaunya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. RSUD (RS Jogja)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005